

Melacak Penerapan *E-Government* dalam Memperkuat Aspek Transparansi dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Dedi Mulyadi,¹ Rosilawati²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Maulana Yusuf Banten

Email: dedimulyadimb@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission: 9 January 2025

Accepted: 11 January 2025

Published: 20 February 2025

Keywords:

e-Government;

Transparency;

Local Government



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

This study aims to elaborate the role of e-Government in strengthening the transparency of local government governance in Indonesia. This is because all local government entities in Indonesia have been required to use various e-government indicators in local government governance. The use of e-Government can provide a real contribution to strengthening indicators of transparency, accountability and information channels for the public in monitoring the running of local government. However, the competence and quality of human resources still affect the operation of the e-government scheme in local government governance. This study uses a literature study approach by identifying several literatures in the last five years based on Google Scholar searches. The results of the study found that the implementation of e-government can be the best means of strengthening aspects of transparency and accountability in local government governance. This study also states that a human resource competency strengthening scheme is needed for local government officials in order to strengthen the implementation of e-Government.

PENDAHULUAN

Penerapan *e-Government* di Indonesia merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Konsep *e-Government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, meningkatkan efisiensi administrasi, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan (Kettunen & Kallio, 2020). Terlebih di Indonesia, isu korupsi dan ketidaktransparan dalam tata kelola anggaran daerah sering menjadi sorotan publik. Dengan demikian, penerapan *e-Government* dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Kendati demikian, permasalahan utama yang dihadapi dalam penerapan *e-Government* di Indonesia adalah ketimpangan dalam infrastruktur teknologi informasi di berbagai daerah. Kota-kota besar di Indonesia biasanya memiliki akses internet yang lebih baik serta fasilitas pendukung yang lebih lengkap dibandingkan dengan daerah pedesaan dan wilayah terpencil.

Ketimpangan ini menyebabkan kesulitan dalam implementasi *e-Government* di seluruh Indonesia, terutama dalam memberikan akses yang sama kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pemerintah secara elektronik. Sementara di tingkat pemerintahan daerah, salah satu masalah khusus yang muncul adalah fragmentasi sistem informasi antar instansi pemerintah. Banyak pemerintah daerah yang belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi, sehingga data antar instansi tidak dapat saling bertukar atau diakses secara efisien. Hal ini membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

lambat dan kurang transparan, karena data yang dibutuhkan untuk publikasi atau laporan tidak mudah diakses oleh masyarakat maupun pihak yang berkepentingan.

Selain itu, penerapan *e-Government* sering kali terkendala oleh resistensi budaya birokrasi yang ada di dalam pemerintahan daerah. Banyak aparatur yang merasa nyaman dengan sistem kerja manual atau tradisional dan enggan untuk beradaptasi dengan sistem baru yang membutuhkan perubahan dalam cara kerja. Kurangnya pemahaman mengenai manfaat transparansi juga menjadi hambatan, karena tidak semua pihak memahami *e-Government* sebagai solusi untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperbaiki kinerja pemerintahan. Selain permasalahan umum dan khusus, terdapat tantangan lain yang lebih mendalam terkait dengan penerapan *e-Government* di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar adalah masalah keamanan data dan perlindungan informasi pribadi. Publik lebih cenderung ragu untuk menggunakan layanan *e-Government* apabila tidak ada jaminan atas kerahasiaan dan keamanannya. Keamanan sistem informasi pemerintah daerah yang terhubung melalui *platform e-Government* sering kali menjadi isu penting yang harus diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah baru berupa penyalahgunaan data atau kebocoran informasi.

Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program-program pemerintah daerah melalui *e-Government* belum sepenuhnya efektif. Meskipun sistem *e-Government* dapat menyediakan akses informasi yang lebih cepat dan transparan, masih terdapat masalah dalam pengawasan anggaran yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Tanpa sistem kontrol yang baik, meskipun ada transparansi, penyalahgunaan anggaran atau kebijakan tetap mungkin terjadi. Penerapan *e-Government* dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia memerlukan upaya sinergis antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Dengan mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diharapkan *e-Government* dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Penerapan *e-Government* di Indonesia, yang bertujuan untuk memperkuat transparansi tata kelola pemerintahan daerah, menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun *e-Government* dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, terdapat masalah mendasar yang perlu diatasi agar potensi ini dapat terwujud sepenuhnya.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan *e-Government* di Indonesia adalah ketimpangan infrastruktur teknologi informasi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Studi Nugroho (2015) menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur TIK yang merata sangat penting untuk memastikan pemerataan akses terhadap layanan *e-Government*. Untuk mengatasi masalah ini, strategi yang diperlukan adalah peningkatan pembangunan infrastruktur TIK oleh pemerintah pusat, serta memastikan bahwa daerah-daerah dengan akses terbatas mendapatkan prioritas pembangunan jaringan yang memadai. Hal itu mengkonfirmasi teori *technology acceptance model* (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989). Menurut TAM, penerimaan terhadap teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama: *perceived usefulness* (kemanfaatan yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan). Jika infrastruktur TIK yang dibangun memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengakses sistem *e-Government* dengan mudah, maka adopsi dan penerimaan teknologi ini akan meningkat. Selain aspek infrastruktur, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga merupakan faktor penting dalam suksesnya penerapan *e-Government*.



Sibarani (2018) menyatakan bahwa kesuksesan implementasi *e-Government* sangat bergantung pada kemampuan pegawai pemerintah untuk menggunakan teknologi informasi dalam memberikan layanan publik. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan keterampilan teknologi informasi bagi aparatur pemerintah daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan kemampuan individu dalam beradaptasi dengan teknologi baru. Pelatihan yang terus menerus akan mempercepat proses adaptasi teknologi, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik yang diberikan. Selain aspek teknis, tantangan besar dalam penerapan *e-Government* adalah kurangnya kesadaran dan komitmen terhadap transparansi di kalangan aparatur pemerintah. Penelitian oleh Nugroho (2015) menunjukkan bahwa banyak aparatur yang belum sepenuhnya memahami manfaat transparansi yang dapat dihasilkan melalui *e-Government*. Untuk itu, strategi yang harus diterapkan adalah meningkatkan kesadaran aparatur pemerintahan dan masyarakat tentang pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik.

Selain itu, penelitian oleh Pratama dan Sulistyo (2020) mengkaji tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan *e-Government* di tingkat pemerintahan daerah Indonesia, dengan fokus pada hambatan struktural dan kultural. Pratama dan Sulistyo menemukan bahwa meskipun *e-Government* memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi, banyak daerah yang masih kesulitan dalam melakukan transisi dari sistem manual ke sistem berbasis teknologi. Studi tersebut mengidentifikasi masalah utama seperti ketidakcukupan infrastruktur, rendahnya literasi digital di kalangan aparatur pemerintah, dan resistensi terhadap perubahan yang kuat dalam budaya birokrasi. Kendati demikian, beberapa penelitian terdahulu masih fokus untuk menegaskan bahwa penerapan *e-government* telah memberikan dampak signifikan bagi penguatan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam konteks pemerintahan daerah. Sementara penelitian ini lebih fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan, sehingga menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu. Dengan demikian penelitian ini ingin mengetahui bagaimana penerapan *e-government* dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah?

METODA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, yang bertujuan untuk mengamati dan menganalisis berbagai informasi terkait topik yang sedang diteliti. Studi kepustakaan adalah jenis penelitian yang memfokuskan pada pengumpulan data secara mendalam melalui sumber-sumber literatur seperti buku, artikel, jurnal, laporan penelitian, dan referensi lain yang relevan, dengan tujuan untuk memahami dan membangun landasan teori yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Proses penelitian studi kepustakaan dalam artikel ini melibatkan beberapa tahapan. *Pertama*, peneliti akan melakukan observasi dan analisis terhadap fenomena yang ada seputar topik yang diteliti. *Kedua*, peneliti akan menetapkan fokus penelitian berdasarkan informasi yang diperoleh dari kajian literatur yang dilakukan dalam lima tahun terakhir. *Ketiga*, sumber data yang dikumpulkan berupa informasi atau data empiris yang berasal dari buku, jurnal, laporan penelitian, serta literatur lain yang dapat memberikan perspektif baru terkait ruang lingkup penelitian.

Dengan pendekatan ini, peneliti diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai variabel yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. *Keempat*, peneliti akan mengkaji berbagai sumber literatur untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, yang memungkinkan penemuan ide-ide baru yang relevan dengan topik penelitian. *Terakhir*, peneliti akan menganalisis catatan-catatan penelitian yang ada untuk menyusun



kesimpulan dalam bentuk laporan penelitian yang sesuai dengan sistematika penulisan yang telah ditentukan. Dengan demikian, metode studi kepustakaan ini tidak hanya mengintegrasikan temuan-temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai kajian pendahuluan (*preliminary studies*), tetapi juga memungkinkan untuk menemukan unsur kebaruan (*novelty*) yang dapat memperkaya penelitian selanjutnya (Arianto & Simatupang, 2024). Penelitian ini berusaha untuk memperdalam pemahaman dan mengembangkan teori yang ada, serta memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran E-Government dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah

E-Government merupakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sektor publik untuk memperbaiki cara-cara pelayanan publik, transparansi, dan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks pemerintahan daerah, *e-Government* dianggap relevan untuk menjawab tantangan besar dalam peningkatan kualitas layanan, efisiensi administratif, serta peningkatan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Transformasi digital ini tidak hanya melibatkan penggunaan sistem berbasis komputer, tetapi juga mencakup perubahan budaya organisasi di pemerintahan daerah (Heeks, 2003). Dalam ranah administrasi publik, *e-Government* dapat memfasilitasi pengelolaan sumber daya, mempercepat proses birokrasi, dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memberikan layanan publik. Salah satu alasan relevansi *e-Government* di pemerintahan daerah adalah kemampuannya dalam meningkatkan aksesibilitas informasi. Dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis web, pemerintah daerah dapat menyediakan informasi yang lebih terbuka kepada masyarakat (Bertot et al., 2010).

Melalui *e-Government*, informasi mengenai kebijakan, regulasi, anggaran, dan layanan publik lainnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Hal ini mendukung keterbukaan, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan adanya *platform* digital yang memadai, masyarakat lebih mudah berpartisipasi dalam pemerintahan dan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan efisien (Norris & Moon, 2005). Namun, relevansi penerapan *e-Government* di pemerintahan daerah juga menghadapi sejumlah tantangan. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Khoury (2012), keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di beberapa daerah dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan digital. Hal ini lebih mengarah pada tantangan disamakan dengan ketimpangan digital di daerah yang belum terjangkau teknologi, yang berpotensi menghambat proses pemerintahan berbasis digital.

Oleh karena itu, meskipun *e-Government* sangat relevan dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah, penting untuk memastikan infrastruktur dan sumber daya manusia memadai untuk mendukung implementasinya. Penerapan *e-Government* dalam pemerintahan daerah memberikan berbagai manfaat yang dapat mempermudah pengelolaan administrasi dan mempercepat pemberian layanan publik. Salah satu manfaat utama dari *e-Government* adalah efisiensi dalam pelayanan publik. Dengan sistem elektronik yang mengotomatisasi berbagai proses administratif, seperti pendaftaran izin usaha, pengajuan permohonan dokumen, dan pelaporan, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas administratif dapat dipersingkat secara signifikan (Gunn & Beath, 2009). Hal ini tidak hanya mengurangi beban birokrasi tetapi juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah, tanpa harus bertatap



muka langsung dengan petugas. Lebih lanjut, *e-Government* juga memperkenalkan manfaat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dengan menyediakan *platform* yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai anggaran pemerintah, program yang sedang dijalankan, serta kebijakan publik, tingkat transparansi akan meningkat. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah memantau penggunaan dana publik dan mengevaluasi efektivitas program yang telah dilaksanakan.

Implementasi sistem *e-procurement* juga berperan penting dalam mengurangi potensi terjadinya korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, yang sering menjadi titik rawan penyalahgunaan anggaran di pemerintahan daerah (Paryadi, 2015). Selain itu, *e-Government* di tingkat daerah dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan kemajuan teknologi, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga dapat terlibat aktif dalam proses pemerintahan. Hal ini dapat terjadi melalui *platform* digital yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan, kritik, atau saran terhadap kebijakan atau program pemerintah (Lathrop & Ruma, 2010). Sebagai contoh, pemerintah daerah dapat menggunakan media sosial atau aplikasi *mobile* untuk memfasilitasi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan atau mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian, *e-Government* turut mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Kusumawati et al., 2025).

Manfaat lainnya adalah pengelolaan data dan informasi yang lebih baik. *E-Government* memungkinkan pengumpulan data yang lebih terstruktur dan sistematis, yang dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan yang lebih efektif. Sistem informasi yang terintegrasi dapat memberikan data yang akurat mengenai demografi, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat, yang sangat penting bagi pengambilan keputusan berbasis bukti (Gil-Garcia, 2012). Dengan pengelolaan data yang lebih baik, pemerintah daerah dapat merencanakan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Penerapan *e-Government* di pemerintahan daerah juga membuka peluang bagi inovasi dalam cara pemerintahan beroperasi. Salah satu bentuk inovasi yang paling signifikan adalah melalui penggunaan teknologi dalam proses pengambilan keputusan yang lebih berbasis data. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah daerah kini dapat memanfaatkan *big data* dan analitik untuk memahami tren dan pola dalam data yang dikumpulkan, sehingga dapat merumuskan kebijakan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Mergel, 2018).

Inovasi ini tidak hanya berhubungan dengan peningkatan efisiensi, tetapi juga dengan pengembangan aplikasi dan *platform* baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup warga, seperti sistem layanan kesehatan berbasis elektronik dan aplikasi pengelolaan sampah (Aichholzer & Schmutzler, 2016). Selain itu, pengembangan *e-Government* dapat memperkenalkan model pemerintahan yang lebih terbuka dan kolaboratif. Inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut digunakan untuk membangun hubungan yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat. *Platform* berbasis *e-Government* memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan atau memberikan umpan balik terhadap kebijakan yang ada (Berto et al., 2010). Hal ini akan meningkatkan keterlibatan publik dalam proses pemerintahan yang lebih demokratis dan responsif, serta memperkuat citra positif pemerintah sebagai entitas yang mendengarkan kebutuhan rakyatnya.



Namun, inovasi yang dihasilkan oleh *e-Government* memerlukan dukungan yang memadai dari sisi regulasi dan kebijakan. Pemerintah daerah harus memastikan adanya kebijakan yang mendukung penggunaan teknologi baru dan memfasilitasi adopsi teknologi tersebut dalam layanan publik. Hal ini meliputi penyusunan peraturan yang jelas mengenai perlindungan data pribadi dan keamanan informasi, yang merupakan isu penting dalam penerapan sistem berbasis digital (Janssen & Kuk, 2015). Regulasi yang tepat akan memastikan bahwa manfaat inovasi yang diperkenalkan melalui *e-Government* dapat dinikmati tanpa mengorbankan keamanan dan privasi masyarakat. Kendati demikian, keberlanjutan implementasi *e-Government* dalam pemerintahan daerah sangat bergantung pada keberhasilan dalam membangun infrastruktur yang memadai serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Investasi dalam infrastruktur teknologi informasi yang tepat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan *e-Government*, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang.

Dampak *E-Government* bagi Penguatan Partisipasi Masyarakat

Penerapan *e-Government* telah menunjukkan dampak signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Salah satu dimensi utama dari *e-Government* adalah pemberdayaan warga negara melalui akses yang lebih luas dan mudah ke informasi serta proses pembuatan keputusan yang transparan (Bertot et al., 2010). Penggunaan *platform* digital dalam pemerintahan daerah memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi kebijakan publik secara langsung, memberikan *feedback*, serta terlibat dalam diskusi yang konstruktif mengenai perencanaan dan evaluasi kebijakan (Norris & Moon, 2005). Dalam konteks ini, *e-Government* tidak hanya menjadi alat penyedia layanan tetapi juga sebagai media interaktif yang memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat melalui *e-Government* di tingkat daerah dapat tercapai melalui berbagai kanal, seperti portal informasi publik, aplikasi mobile, dan media sosial. *E-participation*, yang merujuk pada proses sehingga warga dapat berinteraksi dengan pemerintah melalui *platform* digital, memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, mengajukan pertanyaan, atau bahkan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih demokratis (Dawes, 2008).

Penerapan *platform* seperti pengaduan publik atau *e-voting* mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih berbasis pada aspirasi rakyat. Hasilnya, masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan, yang meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah (Bertot et al., 2010). Selain itu, partisipasi masyarakat yang difasilitasi oleh *e-Government* meningkatkan kepuasan publik terhadap layanan pemerintah. Menurut suatu studi oleh Zhang et al. (2012), ketika masyarakat merasa memiliki akses yang mudah untuk memberikan umpan balik dan mengawasi kebijakan publik melalui *platform* digital, cenderung merasa lebih puas dengan kinerja pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa *e-Government* berpotensi memperkuat legitimasi pemerintahan daerah dan menciptakan suasana yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Penerapan sistem ini, menurut Moon (2002), juga dapat mengurangi kesenjangan antara kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dan ekspektasi masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengelolaan publik yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Namun, dampak positif tersebut tidak selalu langsung dirasakan di seluruh wilayah, terutama di daerah dengan keterbatasan akses internet dan infrastruktur yang tidak memadai.



Hal ini mengharuskan pemerintahan daerah untuk memperhatikan kesenjangan digital yang dapat menghambat inklusivitas partisipasi masyarakat secara menyeluruh (Heeks, 2003). Kendati demikian, implementasi *e-Government* di pemerintahan daerah menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Salah satu tantangan utama adalah masalah infrastruktur teknologi yang tidak merata di seluruh wilayah. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Khoury (2012), daerah-daerah dengan keterbatasan infrastruktur internet atau koneksi *broadband* yang lambat akan kesulitan dalam menjalankan sistem *e-Government* secara efektif. Keterbatasan ini sangat mempengaruhi kualitas layanan digital yang dapat diberikan kepada masyarakat, terutama di daerah terpencil yang jauh dari pusat ekonomi atau perkotaan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan *e-Government* di tingkat daerah.

***E-Government* dan Penguatan Transparansi**

E-Government merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Salah satu tujuan utama dari penerapan *e-Government* adalah untuk memperkuat transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Transparansi, dalam konteks ini, mengacu pada ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh publik untuk memungkinkan pengawasan dan partisipasi aktif dalam proses pemerintahan. Bertot et al., (2010) mengemukakan bahwa penerapan *e-Government* dapat mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan transparansi. Selain itu, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk memperluas aksesibilitas informasi publik dan meningkatkan akuntabilitas, memungkinkan masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam pengawasan kebijakan dan program pemerintah. Menurut Mergel (2018), *e-Government* tidak hanya meningkatkan akses terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik, anggaran, dan pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga memungkinkan terjadinya partisipasi lebih besar dari masyarakat dalam berbagai proses pengambilan keputusan.

Hal ini sangat relevan dengan kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang sebelumnya terkendala oleh birokrasi yang panjang dan proses yang tidak transparan. Penerapan sistem informasi yang berbasis digital, seperti portal informasi publik dan aplikasi layanan pemerintah, dapat memastikan bahwa informasi tersebut tersedia secara terbuka, dapat diakses kapan saja, dan dipahami oleh masyarakat luas. Meskipun *e-Government* memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, tantangan dalam implementasinya perlu diatasi agar manfaat tersebut dapat terwujud secara maksimal. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan digital yang masih ada di banyak daerah, baik di negara maju maupun berkembang. Keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah-daerah terpencil atau daerah dengan akses internet terbatas dapat menghalangi akses masyarakat terhadap informasi publik (Al-Khoury, 2012). Dalam penelitian oleh Heeks (2003), ditemukan bahwa wilayah yang tidak memiliki infrastruktur digital yang memadai akan kesulitan dalam memanfaatkan teknologi untuk mencapai transparansi pemerintahan.

Untuk itu, dibutuhkan investasi yang cukup besar dalam pembangunan infrastruktur teknologi yang dapat menghubungkan seluruh lapisan masyarakat dengan sistem pemerintahan berbasis digital. Selain itu, kualitas data yang disediakan oleh pemerintah juga menjadi tantangan penting. *E-Government* berfungsi hanya jika data yang



dipublikasikan akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti yang dijelaskan oleh Janssen & Kuk (2015), data yang tidak berkualitas dapat mengurangi efektivitas sistem *e-Government* dalam meningkatkan transparansi. Pemerintah harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah informasi yang benar dan relevan, serta memperbarui data secara berkala agar tetap dapat dipercaya oleh masyarakat. Jika data yang disajikan tidak dapat dipertanggungjawabkan atau sering kali tidak akurat, hal ini dapat menurunkan kredibilitas pemerintah dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transparansi yang ditawarkan oleh sistem *e-Government*.

SIMPULAN

Salah satu penerapan tata kelola yang baik harus dengan pemanfaatan sarana digitalisasi. Hal itu dikenal dengan pemerintahan digital (*e-government*). Konsep pemerintahan digital atau *e-government* berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana utama baik untuk urusan informasi maupun komunikasi. Melalui digitalisasi publik akan bisa menerima informasi apapun dengan cepat tanpa batasan apapun. Dengan demikian pemanfaatan *e-government* dapat membuat akuntabilitas dan program kerja yang telah digulirkan dapat diakses dan diketahui oleh publik. Selain itu penerapan *e-government* dapat membuat publik menambah berbagai informasi yang kemudian menjadi pengetahuan baru. Dengan kata lain, penerapan *e-government* dapat meningkatkan akses pelayanan publik yang mudah dan cepat. Akses informasi yang terbuka ini bisa membatu penguatan pengetahuan bagi publik yang kemudian dapat menciptakan partisipasi yang aktif dari warga masyarakat. Dampak utama dari penerapan *e-government* adalah bisa memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan begitu, publik bisa melacak semua program kerja maupun capain dari kinerja pemerintahan daerah. Termasuk bisa mengetahui semua target dan program yang belum berjalan selama periode tertentu. Meski demikian, berbagai tantangan dan kendala masih dihadapi dalam penerapan *e-government* sebagai prasyarat untuk memperkuat aspek transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Kompetensi sumber daya manusia masih menjadi kendala utama bagi mayoritas pemerintahan daerah untuk menerapkan *e-government*. Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa penerapan *e-government* dapat memberikan dampak signifikan sebagai saluran utama bagi penguatan aspek transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aichholzer, G., & Schmutzler, M. (2016). E-Government as an Innovation Driver: Challenges and Future Perspectives. *Journal of E-Government Studies and Best Practices*, 7(1), 5-18.
- Al-Khoury, A. M. (2012). E-Government in Developing Countries. *International Journal of E-Government Research*, 8(3), 1-15.
- Arianto, B., & Simatupang, L. (2024). Konsep Dasar Metoda Studi Kepustakaan. Borneo Novelty Publishing. <https://doi.org/10.70310/pe2eeb30>
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to Create a Culture of Transparency: E-Government and Social Media as Openness and Anti-corruption Tools for Societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264-271.
- Davis, F. D. (1989). *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*. MIS Quarterly, 13(3), 319-340.
- Gil-Garcia, J. R. (2012). E-Government: A Consolidated Perspective. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 6(4), 338-357.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

- Gunn, L. M., & Beath, J. (2009). The Role of E-Government in Supporting Public Sector Reform. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 19(1), 1-15
- Heeks, R. (2003). E-Government for Development. *Development Informatics*, 5(3), 1-5
- Janssen, M., & Kuk, G. (2015). Data Governance in the Context of Open Government. *Journal of E-Government Research and Applications*, 11(3), 35-48.
- Mergel, I. (2018). Social Media in the Public Sector: A Guide to Participation, Open Innovation, and Crowdsourcing. *Jossey-Bass*.
- Moon, M. J. (2002). The Evolution of E-Government among Municipalities: Rhetoric or Reality? *Public Administration Review*, 62(4), 424-433.
- Norris, D. F., & Moon, M. J. (2005). Advancing E-Government at the Local Level: Toward a Model of Local E-Government Maturity. *Public Administration Review*, 65(3), 1-8
- Nugroho, Y. (2015). *Tantangan dan Peluang Implementasi e-Government di Indonesia*. Jurnal Teknologi Informasi, 11(3), 35-46.
- Kettunen, P., & Kallio, J. (2020). *e-Government and its Impact on Transparency in Public Administration: A Global Perspective*. Springer
- Kusumawati, N., Lestari, D. M., & Sari, G. I. (2025). Studi Fenomenologi Digitalisasi dan Akuntabilitas Digital Keuangan Desa. *AKUNTANOGRAFI: Journal of Accounting Research*, 1(1), 1-15.
- Lathrop, D., & Ruma, L. (2010). Open Government: Collaboration, Transparency, and Participation in Practice. *O'Reilly Media*
- Paryadi, D. (2015). E-Procurement and Its Effectiveness in Public Sector Transparency. *Public Procurement Journal*, 22(3), 45-59.
- Dawes, S. S. (2008). The Impact of E-Government on Citizen Participation. *Public Administration Review*, 68(5), 1-12.
- Pratama, D., & Sulistyo, M. (2020). *Tantangan Penerapan e-Government di Pemerintahan Daerah Indonesia*. Jurnal Teknologi dan Manajemen, 25(4), 55-72.
- Sibarani, M. (2018). *Penerapan e-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Indonesia*. Jurnal Administrasi Negara, 13(2), 143-158.
- Zhang, X., Zhao, X., & He, W. (2012). The Impact of E-Government on Transparency in Public Sector. *Information Polity*, 17(3), 123-135.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.